



**PENGADILAN TINGGI BENGKULU**  
Jalan Pembangunan Padang Harapan Telp. (0736) 21585 – 22231  
Home Page : [www.pt-bengkulu.go.id](http://www.pt-bengkulu.go.id) E-mail : [pt\\_bengkulu@yahoo.co.id](mailto:pt_bengkulu@yahoo.co.id)  
**B E N G K U L U**

---

28 Juni 2016

Nomor : W8-U/132/PL.01.10/VI/2016  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Penyusunan RKA/KL Pagu Indikatif tahun anggaran 2017  
sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

Kepada Yth.  
Sekretaris Pengadilan Negeri  
Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

Menindak lanjuti surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No. 137/BUA/OT.01.1/6/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal penyusunan RKA/KL pagu indikatif tahun anggaran 2017 pada 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia, dengan ini kami sampaikan bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) pagu indikatif Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya tahun anggaran 2017 yang akan dilaksanakan diseluruh Pengadilan Tingkat banding, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Tingkat pertama melakukan penyusunan RKA-KL sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan tidak boleh melakukan pergeseran pagu yang telah ditetapkan. Selanjutnya Pengadilan tingkat pertama WAJIB menyampaikan ADK tersebut ke Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam bentuk ADK span maksimal 2 (dua) hari setelah pagu dikirim oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu sesuai dengan pagu yang sudah ditetapkan serta melengkapi data dukung berupa :
  - a. RAB (Rincian Anggaran Belanja)
  - b. TOR (Term of Reference)
  - c. Data dukung lainnya berupa : data aset dari hasil cetakan aplikasi SIMAK BMN, Kuitansi listrik dengan biaya tertinggi, khusus yang ada pembangunan gedung lanjutan melengkapi dengan RAB kebutuhan penyelesaian gedung kator tersebut.
  - d. Data dukung tersebut diatas diserahkan dalam bentuk PDF.

2. Tim Mahkamah Agung akan melakukan penelaahan/koreksi RKA/KL satker daerah dengan tingkat banding sesuai dengan pagu yang telah diberikan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi tanpa melakukan pergeseran pagu, dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana jadwal terlampir.
3. Hasil dari penyusunan RKAKL akan dilakukan reviu oleh Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai dasar pengalokasian pagu anggaran (pagu sementara).

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

✓ **Kepala Bagian perencanaan dan Kepegawaian,**



**RIDARTO, SH.MSi**

**NIP. 196005231982111002**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP.3843348,3810350,3457611 FAX 3810361  
TROMOL POS NO.1020 – JAKARTA 10010

Nomor : 137 /BUA/OT.01.1/6/2016  
Lampiran : satu lembar  
Hal : Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2017  
Pada 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia

Jakarta, 15 Juni 2016

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding  
4 (empat) lingkungan Peradilan  
di  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 0163/M.PPN/05/2016 dan S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga Tahun 2017, dengan ini kami sampaikan bahwa Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Indikatif Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun Anggaran 2017 yang akan dilaksanakan di seluruh pengadilan tingkat banding, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi akan mengirimkan Pagu TA 2017 beserta Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan RKA-K/L melalui email ke Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan.
2. Tingkat Banding **WAJIB** meneruskan Pagu TA 2017 kepada masing-masing satker Tingkat Pertama, dan Tingkat Pertama melakukan penyusunan RKA-K/L sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) dan tidak diperbolehkan melakukan pergeseran pagu yang telah ditetapkan. Selanjutnya Tingkat Pertama **WAJIB** menyampaikan ADK tersebut ke Tingkat Banding dalam bentuk **backup span** maksimal 2 (dua) hari setelah pagu dikirim oleh Tingkat Banding sesuai dengan Pagu yang sudah ditetapkan, serta melengkapi data dukung berupa:
  - a. RAB (Rincian Anggaran Belanja).
  - b. TOR (*Term of Reference*).
  - c. Data dukung lainnya, berupa: Data aset dari hasil cetakan Aplikasi SIMAK BMN, Kuitansi listrik dengan biaya tertinggi, khusus yang ada pembangunan gedung lanjutan melengkapi dengan RAB kebutuhan penyelesaian gedung kantor tersebut.
  - d. Data dukung tersebut diatas diserahkan dalam bentuk **PDF**.
3. Tim Mahkamah Agung akan melakukan penelaahan/koreksi RKA-K/L satker daerah dengan Tingkat Banding sesuai dengan pagu yang telah diberikan oleh Biro Perencanaan dan Organasasi tanpa melakukan pergeseran pagu, dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana jadwal terlampir.
4. Hasil dari penyusunan RKA-K/L tersebut akan dilakukan reuiu oleh Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai dasar pengalokasian pagu anggaran (pagu sementara).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Urusan Administrasi  
  
Dr. Drs. Aco Nur, MH

Tembusan :

1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Umum;
6. Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Agama;
7. Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN.

**JADUAL PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF  
PADA 4 LINGKUNGAN PERADILAN TAHUN ANGGARAN 2017**

| NO | HARI/TANGGAL      | PROPINSI                          |
|----|-------------------|-----------------------------------|
| 1  | 18 - 20 Juli 2016 | Kalimantan Timur                  |
|    |                   | Maluku Utara                      |
|    |                   | Bangka Belitung                   |
|    |                   | Bengkulu                          |
|    |                   | Nusa Tenggara Timur               |
|    |                   | Riau + Kepulauan Riau             |
|    |                   | Maluku                            |
|    |                   | Sulawesi Selatan + Sulawesi Barat |
| 2  | 21 - 23 Juli 2016 | Sulawesi Utara                    |
|    |                   | Papua - Papua Barat               |
|    |                   | Sumatera Selatan                  |
|    |                   | Sulawesi Tenggara                 |
|    |                   | Jawa Timur                        |
|    |                   | Banda Aceh                        |
|    |                   | Kalimantan Tengah                 |
|    |                   | Sulawesi Tengah                   |
| 3  | 25 - 27 Juli 2016 | Kalimantan Selatan                |
|    |                   | Banten                            |
|    |                   | Sumatera Utara                    |
|    |                   | Gorontalo                         |
|    |                   | Denpasar                          |
|    |                   | Kalimantan Barat                  |
|    |                   | Nusa Tenggara Barat               |
| 4  | 28 - 30 Juli 2016 | Sumatera Barat                    |
|    |                   | Jambi                             |
|    |                   | Jawa Tengah                       |
|    |                   | Lampung                           |
|    |                   | Jawa Barat                        |
|    |                   | DI Yogyakarta                     |
|    |                   | DKI Jakarta                       |

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi



Joko Lopyo Pribadi